

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis paparkan pada BAB IV mengenai sistem dan prosedur penggajian pegawai di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat maka dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Sistem penggajian pegawai yang diterapkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari sistem penggajian yang dipakai, perhitungan gaji pegawai, jaringan prosedur pencairan gaji, dan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penggajian telah sesuai dengan sistem dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah dengan mengacu pada peraturan-peraturan pemerintah.
2. Unsur-unsur pembentukan gaji pegawai negeri sipil pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat terdiri dari gaji pokok, tunjangan-tunjangan, dan pemotongan gaji pegawai.
3. Sistem penggajian pegawai negeri sipil pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat memerlukan dokumen pendukung yang menjadi pedoman dalam menetapkan besarnya gaji pokok dan tunjangan yang akan diberikan.
4. Prosedur penggajian pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dimulai dari perhitungan gaji, pengajuan SPP LS, SPM LS, SP2D hingga gaji pegawai dapat dicairkan oleh Bank.

5. Sistem yang diterapkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat yaitu sistem penggajian campuran yaitu dalam sistem ini gaji pokok ditentukan sama bagi pegawai negeri sipil yang berpangkat sama, disamping itu diberikan tunjangan pegawai dan tunjangan khusus berupa tunjangan kinerja kepada pegawai yang memiliki jabatan di lingkungan BPK.
6. Sistem pengendalian internal yang diterapkan dalam penggajian BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat berupa pemisahan tugas dan koordinasi terhadap setiap bagian yang bertugas dalam penggajian pegawai.

#### **B. Saran**

Adapun saran dari penulis yaitu dalam perhitungan absensi pegawai dibutuhkan adanya koordinasi antara kepala bagian dengan sub bagian kepegawaian untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap absensi pegawai karena saat ini sistem absensi hanya berupa mesin absen dan tidak ada pemantauan lebih lanjut sehingga akan dengan mudah terjadi penyalahgunaan daftar hadir karena kurangnya pengawasan yang dilakukan.